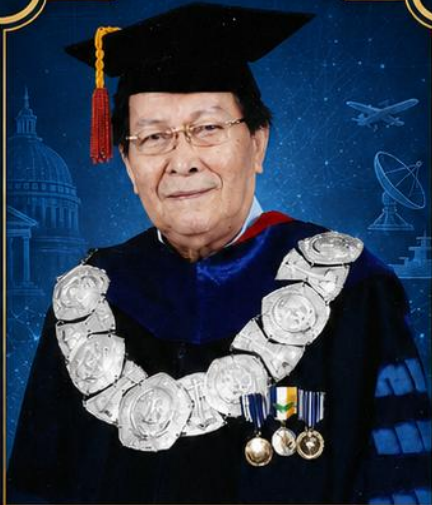


OLIGARKI DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI POLITIK INDONESIA



Oleh
Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

 www.rudycr.com/cv.pdf

IBM - ASMI

1 Apa yang Dimaksud?



Oligarki adalah situasi ketika kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki akses besar terhadap modal, kebijakan, sumber daya, dan jaringan pengaruh. Dalam konteks Indonesia, oligarki tampak melalui kedekatan antara kekuatan bisnis, politik, dan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan.

2 Bagaimana Kekayaan Terkonsentrasi?



- Kepemilikan aset dan lahan yang timpang
- Akses modal dan kredit lebih mudah bagi kelompok besar
- Hubungan bisnis-politik dalam regulasi dan proyek
- Konsentrasi pasar pada sektor strategis
- Pengaruh media dan platform terhadap opini publik

3 Dampak Ekonomi



- Pertumbuhan bisa cepat tetapi kurang inklusif
- UMKM dan koperasi sulit bersaing
- Distribusi aset, kesempatan, dan produktivitas melebar
- Risiko monopoli dan rente ekonomi meningkat
- Ketahanan daerah tertinggal melemah

4 Dampak Sosial dan Politik



- Ketimpangan memperlebar jarak sosial
- Mobilitas sosial menjadi lebih terbatas
- Kebijakan rentan menguntungkan elite
- Checks and balances dapat melemah
- Kepercayaan publik pada demokrasi menurun

5 Indikator yang Perlu Dipantau



- ✓ Gini ratio dan kemiskinan
- ✓ Konsentrasi kepemilikan aset
- ✓ Persaingan usaha yang sehat
- ✓ Akses kredit bagi UMKM
- ✓ Kualitas pekerjaan dan upah
- ✓ Belanja sosial dan layanan publik
- ✓ Partisipasi publik dalam kebijakan

6 Pertanyaan Kunci Masa Depan

“Apakah Indonesia akan mampu mengubah pertumbuhan yang terkonsentrasi menjadi kemakmuran yang lebih merata, atau justru memperkuat struktur oligarkis yang membatasi distribusi kekayaan dan kesempatan?”

7 Agenda Pembaruan



1. Reformasi pendanaan politik



2. Transparansi kebijakan publik



3. Penguatan lembaga pengawas dan peradilan



4. Perlindungan persaingan usaha yang adil



5. Penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi daerah



6. Perluasan akses pendidikan, digital, dan keuangan



“Masa depan demokrasi ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan pertumbuhan, keadilan distribusi, dan pembatasan pengaruh oligarki dalam kebijakan publik.”



Oligarki dan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Politik Indonesia

Oleh Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

IBM - ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

[RudyCT Academic Series](#) 2026

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara oligarki dan distribusi kekayaan dalam ekonomi politik Indonesia dengan menempatkan kekayaan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik, sekaligus melihat institusi politik sebagai faktor yang membentuk peluang akumulasi kekayaan. Pendekatan yang digunakan bersifat naratif-analitis dan menggabungkan perspektif oligarki, ekonomi politik institusional, demokrasi klientelistik, persaingan usaha, serta teori ketimpangan. Analisis menekankan perbedaan antara ketimpangan pendapatan/pengeluaran dan konsentrasi kekayaan berupa tanah, properti, saham, perusahaan, konsesi, serta aset finansial. Dalam konteks mutakhir, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,29 persen year-on-year pada triwulan II-2026; kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, sementara Gini Ratio tercatat 0,368. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan distribusi dapat bergerak dengan dinamika yang berbeda. Artikel berargumen bahwa tantangan utama Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan dan pemerataan, melainkan membangun institusi yang membuat pertumbuhan lebih kompetitif, produktif, dan inklusif. Agenda yang dibahas mencakup reformasi pendanaan politik, transparansi beneficial ownership, penguatan persaingan usaha, reformasi pajak, tata kelola sumber daya alam, penguatan UMKM dan koperasi, pembangunan aset rumah tangga, pluralisme media, serta tata kelola ekonomi digital dan AI. Kesimpulannya, demokrasi ekonomi membutuhkan negara yang kuat tetapi terbatas oleh hukum, pasar yang dinamis tetapi tidak dikuasai privilege, dan masyarakat yang memiliki akses luas untuk membangun modal manusia maupun aset produktif.

Kata Kunci: oligarki; distribusi kekayaan; ekonomi politik; ketimpangan; state capture; demokrasi ekonomi; Indonesia; persaingan usaha; UMKM; tata kelola.

Catatan Data Mutakhir

Ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen. Pada triwulan II-2026 pertumbuhan mencapai 5,29 persen year-on-year dan semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibanding semester I-2025 (Badan Pusat Statistik, 2026a, 2026b).

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Pada saat yang sama Gini Ratio pengeluaran tercatat 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025 tetapi lebih rendah dibanding 0,375 pada Maret 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026c, 2026d).

Angka Gini pengeluaran tidak sama dengan ukuran konsentrasi kekayaan. Karena itu, pembahasan oligarki memerlukan indikator tambahan tentang kepemilikan aset, struktur perusahaan, beneficial ownership, penguasaan tanah, kekuatan pasar, serta akses terhadap pembiayaan dan kebijakan.

1. Pendahuluan: Mengapa Oligarki dan Distribusi Kekayaan Harus Dibaca Bersama

Pertama, pembahasan mengenai oligarki dan distribusi kekayaan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, konsentrasi sumber daya ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik tidak cukup dipahami

sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama demokrasi formal tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu oligarki dan distribusi kekayaan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai konsentrasi sumber daya ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, demokrasi formal tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kualitas distribusi, mobilitas sosial, dan keterbukaan akses, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu konsentrasi sumber daya ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai demokrasi formal tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi

menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kualitas distribusi, mobilitas sosial, dan keterbukaan akses tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Indonesia pasca-Reformasi memperlihatkan koeksistensi pemilu kompetitif dengan jaringan kekayaan dan kekuasaan yang kuat, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu demokrasi formal tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa oligarki dan distribusi kekayaan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

2. Memahami Oligarki: Konsep, Batasan, dan Perdebatan Teoretis

Pertama, pembahasan mengenai definisi oligarki perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Jeffrey Winters menekankan basis material dan politik pertahanan kekayaan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Hadiz dan Robison menekankan reorganisasi kekuasaan oligarkis dalam kapitalisme dan demokrasi pasca-Suharto, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu definisi oligarki menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari

competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai Jeffrey Winters menekankan basis material dan politik pertahanan kekayaan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Hadiz dan Robison menekankan reorganisasi kekuasaan oligarkis dalam kapitalisme dan demokrasi pasca-Suharto tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama pluralisme mengingatkan bahwa kekuasaan tersebar dan oligarki bukan satu-satunya penjelasan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu Jeffrey Winters menekankan basis material dan politik pertahanan kekayaan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai Hadiz dan Robison menekankan reorganisasi kekuasaan oligarkis dalam kapitalisme dan demokrasi pasca-Suharto perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pluralisme mengingatkan bahwa kekuasaan tersebar dan oligarki bukan satu-satunya penjelasan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama konsep harus digunakan secara analitis, bukan sebagai label moral untuk setiap elite, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu Hadiz dan Robison menekankan reorganisasi kekuasaan oligarkis dalam kapitalisme dan demokrasi pasca-Suharto menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh

kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa definisi oligarki harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

3. Dari Ketimpangan Pendapatan ke Konsentrasi Kekayaan

Pertama, pembahasan mengenai perbedaan income inequality dan wealth inequality perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Gini pengeluaran menggambarkan distribusi konsumsi tetapi tidak langsung mengukur kepemilikan aset tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama tanah, properti, saham, perusahaan, konsesi, dan aset finansial membentuk kekayaan antar-generasi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu perbedaan income inequality dan wealth inequality menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai Gini pengeluaran menggambarkan distribusi konsumsi tetapi tidak langsung mengukur kepemilikan aset perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, tanah, properti, saham, perusahaan, konsesi, dan aset finansial membentuk kekayaan antar-generasi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang

berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama return on capital dapat memperlebar jarak bila kesempatan kepemilikan tidak merata, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu Gini pengeluaran menggambarkan distribusi konsumsi tetapi tidak langsung mengukur kepemilikan aset menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa perbedaan income inequality dan wealth inequality harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

4. Akar Historis Ekonomi Politik Oligarkis di Indonesia

Pertama, pembahasan mengenai warisan kolonial dan struktur ekstraktif perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Orde Baru membangun kapitalisme yang erat dengan negara, lisensi, monopoli, konglomerasi, dan patronase tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama krisis 1997-1998 mengubah institusi tetapi tidak menghapus seluruh jaringan ekonomi lama, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu warisan kolonial dan struktur ekstraktif menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar

sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai Orde Baru membangun kapitalisme yang erat dengan negara, lisensi, monopoli, konglomerasi, dan patronase perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, krisis 1997-1998 mengubah institusi tetapi tidak menghapus seluruh jaringan ekonomi lama tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama desentralisasi memindahkan sebagian arena patronase ke daerah, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu Orde Baru membangun kapitalisme yang erat dengan negara, lisensi, monopoli, konglomerasi, dan patronase menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai krisis 1997-1998 mengubah institusi tetapi tidak menghapus seluruh jaringan ekonomi lama perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, desentralisasi memindahkan sebagian arena patronase ke daerah tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Reformasi mengubah bentuk kompetisi tanpa sepenuhnya memutuskan hubungan antara kekayaan dan kekuasaan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu krisis 1997-1998 mengubah institusi tetapi tidak menghapus seluruh jaringan ekonomi lama menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial,

pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa warisan kolonial dan struktur ekstraktif harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

5. Reformasi 1998: Demokratisasi Politik dan Reorganisasi Kekuasaan Ekonomi

Pertama, pembahasan mengenai pemilu bebas, desentralisasi, kebebasan pers, dan penguatan masyarakat sipil perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, aktor ekonomi besar beradaptasi dengan sistem multipartai tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama pendanaan politik dan biaya kampanye menciptakan permintaan terhadap sumber daya finansial, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu pemilu bebas, desentralisasi, kebebasan pers, dan penguatan masyarakat sipil menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai aktor ekonomi besar beradaptasi dengan sistem multipartai perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pendanaan politik dan biaya kampanye menciptakan permintaan terhadap sumber daya finansial tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca

bersama koalisi pragmatis memperluas hubungan antara bisnis dan politik, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu aktor ekonomi besar beradaptasi dengan sistem multipartai menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai pendanaan politik dan biaya kampanye menciptakan permintaan terhadap sumber daya finansial perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, koalisi pragmatis memperluas hubungan antara bisnis dan politik tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama demokrasi membuka ruang koreksi tetapi juga menciptakan pasar baru bagi patronase, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu pendanaan politik dan biaya kampanye menciptakan permintaan terhadap sumber daya finansial menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa pemilu bebas, desentralisasi, kebebasan pers, dan penguatan masyarakat sipil harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan

diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

6. Biaya Politik, Pendanaan Pemilu, dan Sirkulasi Kepentingan Ekonomi

Pertama, pembahasan mengenai mahalunya kompetisi elektoral perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, biaya kampanye mendorong kandidat mencari donor dan jaringan pembiayaan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kontribusi ekonomi dapat menghasilkan akses terhadap kebijakan, izin, atau informasi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu mahalunya kompetisi elektoral menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai biaya kampanye mendorong kandidat mencari donor dan jaringan pembiayaan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kontribusi ekonomi dapat menghasilkan akses terhadap kebijakan, izin, atau informasi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama clientelism dan vote buying harus dibedakan dari oligarki namun dapat berinteraksi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu biaya kampanye mendorong kandidat mencari donor dan jaringan pembiayaan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau

proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai kontribusi ekonomi dapat menghasilkan akses terhadap kebijakan, izin, atau informasi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, clientelism dan vote buying harus dibedakan dari oligarki namun dapat berinteraksi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama reformasi pendanaan partai dan transparansi menjadi prasyarat mengurangi ketergantungan politik pada pemilik modal, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kontribusi ekonomi dapat menghasilkan akses terhadap kebijakan, izin, atau informasi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa mahalunya kompetisi elektoral harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

7. Negara, Regulasi, dan Risiko State Capture

Pertama, pembahasan mengenai state capture adalah kondisi ketika kepentingan sempit mampu membentuk aturan bagi keuntungan sendiri perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, capture berbeda dari korupsi transaksi biasa karena bekerja pada level pembuatan kebijakan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama izin, konsesi, tata ruang, pengadaan, pajak, dan regulasi

persaingan merupakan arena penting, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu state capture adalah kondisi ketika kepentingan sempit mampu membentuk aturan bagi keuntungan sendiri menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai capture berbeda dari korupsi transaksi biasa karena bekerja pada level pembuatan kebijakan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, izin, konsesi, tata ruang, pengadaan, pajak, dan regulasi persaingan merupakan arena penting tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama lembaga pengawas yang independen memperkecil capture, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu capture berbeda dari korupsi transaksi biasa karena bekerja pada level pembuatan kebijakan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai izin, konsesi, tata ruang, pengadaan, pajak, dan regulasi persaingan merupakan arena penting perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah

sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, lembaga pengawas yang independen memperkecil capture tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama transparansi proses kebijakan dan conflict-of-interest rules diperlukan untuk menjaga kepentingan publik, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu izin, konsesi, tata ruang, pengadaan, pajak, dan regulasi persaingan merupakan arena penting menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa state capture adalah kondisi ketika kepentingan sempit mampu membentuk aturan bagi keuntungan sendiri harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

8. Sumber Daya Alam, Konsesi, dan Politik Rente

Pertama, pembahasan mengenai pertambangan, perkebunan, kehutanan, energi, dan lahan memiliki rente ekonomi besar perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kelangkaan izin menciptakan nilai politik atas kewenangan administratif tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama hubungan pusat-daerah memengaruhi distribusi rente, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu pertambangan, perkebunan, kehutanan, energi, dan lahan memiliki rente ekonomi besar menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin

luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai kelangkaan izin menciptakan nilai politik atas kewenangan administratif perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, hubungan pusat-daerah memengaruhi distribusi rente tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama komunitas lokal menanggung eksternalitas lingkungan bila tata kelola lemah, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kelangkaan izin menciptakan nilai politik atas kewenangan administratif menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai hubungan pusat-daerah memengaruhi distribusi rente perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, komunitas lokal menanggung eksternalitas lingkungan bila tata kelola lemah tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama hilirisasi harus memastikan nilai tambah tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal besar, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu hubungan pusat-daerah memengaruhi distribusi rente menjadi penting karena kualitas

pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa pertambangan, perkebunan, kehutanan, energi, dan lahan memiliki rente ekonomi besar harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

9. Hilirisasi, Industrialisasi, dan Pertanyaan tentang Siapa yang Menikmati Nilai Tambah

Pertama, pembahasan mengenai hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, ekspor, dan investasi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, manfaat perlu dinilai berdasarkan upah, pajak, transfer teknologi, kandungan lokal, dan multiplier daerah tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama struktur kepemilikan menentukan siapa menerima surplus, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, ekspor, dan investasi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai manfaat perlu dinilai berdasarkan upah, pajak, transfer teknologi, kandungan lokal, dan multiplier daerah perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi

sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, struktur kepemilikan menentukan siapa menerima surplus tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama insentif industri perlu bersyarat pada produktivitas, inovasi, dan pembangunan pemasok lokal, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu manfaat perlu dinilai berdasarkan upah, pajak, transfer teknologi, kandungan lokal, dan multiplier daerah menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, ekspor, dan investasi harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

10. Konglomerasi, Persaingan Usaha, dan Struktur Pasar

Pertama, pembahasan mengenai konsentrasi pasar dapat menghasilkan efisiensi tetapi juga market power perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, dominasi perusahaan besar dapat menaikkan hambatan masuk tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama *cross-ownership* antara sektor ekonomi dan media menambah dimensi politik, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu konsentrasi pasar dapat menghasilkan efisiensi tetapi juga market power menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan

bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai dominasi perusahaan besar dapat menaikkan hambatan masuk perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, *cross-ownership* antara sektor ekonomi dan media menambah dimensi politik tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama KPPU dan tata kelola persaingan penting untuk menjaga *contestability*, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu dominasi perusahaan besar dapat menaikkan hambatan masuk menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasar dapat menghasilkan efisiensi tetapi juga *market power* harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

11. Perbankan, Kredit, dan Akses terhadap Modal

Pertama, pembahasan mengenai akses kredit menentukan kemampuan rumah tangga dan usaha membangun aset perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi

menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, perusahaan besar biasanya memiliki collateral, reputasi, dan jaringan yang lebih kuat tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama UMKM menghadapi biaya informasi, agunan, dan risiko yang lebih tinggi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu akses kredit menentukan kemampuan rumah tangga dan usaha membangun aset menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai perusahaan besar biasanya memiliki collateral, reputasi, dan jaringan yang lebih kuat perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, UMKM menghadapi biaya informasi, agunan, dan risiko yang lebih tinggi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama inklusi keuangan perlu bergerak dari sekadar kepemilikan rekening menuju kredit produktif, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu perusahaan besar biasanya memiliki collateral, reputasi, dan jaringan yang lebih kuat menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa akses kredit menentukan kemampuan rumah tangga dan usaha membangun aset harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif

tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

12. Tanah, Properti, dan Kekayaan Antar-Generasi

Pertama, pembahasan mengenai tanah adalah aset ekonomi sekaligus sumber kekuasaan sosial perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kenaikan harga properti memberi capital gain kepada pemilik lama tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kelompok tanpa aset menghadapi beban sewa dan hambatan kepemilikan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu tanah adalah aset ekonomi sekaligus sumber kekuasaan sosial menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai kenaikan harga properti memberi capital gain kepada pemilik lama perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kelompok tanpa aset menghadapi beban sewa dan hambatan kepemilikan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama reforma agraria, kepastian hak, tata ruang, dan pajak properti dapat memengaruhi distribusi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kenaikan harga properti memberi capital gain kepada pemilik lama menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan

pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa tanah adalah aset ekonomi sekaligus sumber kekuasaan sosial harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

13. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Lokal dalam Bayang-Bayang Konsentrasi

Pertama, pembahasan mengenai UMKM menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi lokal perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kesenjangan produktivitas dengan perusahaan besar membatasi upah dan akumulasi modal tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama koperasi dapat menjadi instrumen collective ownership bila profesional dan transparan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu UMKM menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi lokal menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai kesenjangan produktivitas dengan perusahaan besar membatasi upah dan akumulasi modal perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, koperasi dapat menjadi instrumen collective

ownership bila profesional dan transparan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama digital marketplace membuka akses pasar tetapi juga menimbulkan ketergantungan platform, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kesenjangan produktivitas dengan perusahaan besar membatasi upah dan akumulasi modal menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa UMKM menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi lokal harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

14. Pasar Tenaga Kerja, Upah, Produktivitas, dan Distribusi Hasil Pertumbuhan

Pertama, pembahasan mengenai distribusi kekayaan dipengaruhi hubungan antara upah dan produktivitas perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pekerjaan informal dan rentan membatasi tabungan serta kepemilikan aset tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama human capital memperluas mobilitas tetapi tidak cukup bila struktur kesempatan tertutup, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu distribusi kekayaan dipengaruhi hubungan antara upah dan produktivitas menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan

dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai pekerjaan informal dan rentan membatasi tabungan serta kepemilikan aset perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, *human capital* memperluas mobilitas tetapi tidak cukup bila struktur kesempatan tertutup tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama *bargaining power* pekerja, standar kerja, dan perlindungan sosial berperan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu pekerjaan informal dan rentan membatasi tabungan serta kepemilikan aset menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dipengaruhi hubungan antara upah dan produktivitas harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

15. Pajak, APBN, dan Redistribusi

Pertama, pembahasan mengenai sistem pajak adalah jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pajak penghasilan, konsumsi, properti, dan kekayaan memiliki dampak distribusi berbeda tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama *tax expenditure* dan insentif harus dievaluasi manfaat publiknya, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang

memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu sistem pajak adalah jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai pajak penghasilan, konsumsi, properti, dan kekayaan memiliki dampak distribusi berbeda perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, *tax expenditure* dan insentif harus dievaluasi manfaat publiknya tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial membangun *equality of opportunity*, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu pajak penghasilan, konsumsi, properti, dan kekayaan memiliki dampak distribusi berbeda menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa sistem pajak adalah jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

16. BUMN, Pengadaan Publik, dan Tata Kelola Kekayaan Negara

Pertama, pembahasan mengenai BUMN memegang aset strategis dan dapat menjadi instrumen pembangunan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, risiko muncul bila tujuan komersial, politik, dan sosial tidak dipisahkan secara jelas tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama pengadaan publik adalah pasar besar yang dapat mendorong inovasi atau menjadi arena rente, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu BUMN memegang aset strategis dan dapat menjadi instrumen pembangunan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai risiko muncul bila tujuan komersial, politik, dan sosial tidak dipisahkan secara jelas perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, pengadaan publik adalah pasar besar yang dapat mendorong inovasi atau menjadi arena rente tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama transparansi, audit, meritokrasi, dan board governance sangat penting, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu risiko muncul bila tujuan komersial, politik, dan sosial tidak dipisahkan secara jelas menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi

kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa BUMN memegang aset strategis dan dapat menjadi instrumen pembangunan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

17. Media, Platform Digital, dan Kekuasaan Informasi

Pertama, pembahasan mengenai kekuatan ekonomi modern tidak hanya berbentuk modal fisik tetapi juga kontrol atas informasi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kepemilikan media dapat memengaruhi agenda publik tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama platform digital menguasai data, distribusi perhatian, dan algoritma rekomendasi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kekuatan ekonomi modern tidak hanya berbentuk modal fisik tetapi juga kontrol atas informasi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai kepemilikan media dapat memengaruhi agenda publik perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, platform digital menguasai data, distribusi perhatian, dan algoritma rekomendasi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama konsentrasi informasi dapat memperkuat asimetri politik, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan

sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kepemilikan media dapat memengaruhi agenda publik menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi modern tidak hanya berbentuk modal fisik tetapi juga kontrol atas informasi harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

18. AI, Data, dan Oligarki Baru di Era Ekonomi Digital

Pertama, pembahasan mengenai AI meningkatkan return bagi pemilik data, compute, model, dan talenta perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, *network effects* dapat menciptakan *winner-takes-most markets* tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Indonesia berpeluang membangun ekosistem AI lokal yang lebih inklusif, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu AI meningkatkan return bagi pemilik data, compute, model, dan talenta menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai network effects dapat menciptakan winner-takes-most markets perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Indonesia berpeluang membangun ekosistem AI lokal yang lebih inklusif tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama akses cloud, data governance, keterampilan, dan interoperabilitas menentukan distribusi manfaat, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu network effects dapat menciptakan winner-takes-most markets menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa AI meningkatkan return bagi pemilik data, compute, model, dan talenta harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

19. Ketimpangan Wilayah dan Geografi Kekayaan

Pertama, pembahasan mengenai aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi secara spasial perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Jawa tetap menyumbang bagian terbesar PDB tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama daerah kaya sumber daya tidak selalu memiliki kesejahteraan tertinggi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi

secara spasial menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai Jawa tetap menyumbang bagian terbesar PDB perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, daerah kaya sumber daya tidak selalu memiliki kesejahteraan tertinggi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan kapasitas pemerintah daerah menentukan kemampuan menangkap nilai tambah, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu Jawa tetap menyumbang bagian terbesar PDB menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi secara spasial harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

20. Kemiskinan, Kelas Menengah, dan Kerentanan Ekonomi

Pertama, pembahasan mengenai penurunan kemiskinan adalah capaian penting tetapi tidak identik dengan keamanan ekonomi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi

menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, rumah tangga di atas garis kemiskinan dapat tetap rentan terhadap guncangan tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kelas menengah memerlukan pekerjaan berkualitas, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu penurunan kemiskinan adalah capaian penting tetapi tidak identik dengan keamanan ekonomi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai rumah tangga di atas garis kemiskinan dapat tetap rentan terhadap guncangan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kelas menengah memerlukan pekerjaan berkualitas, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama ketimpangan aset memengaruhi daya tahan terhadap krisis, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindari analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu rumah tangga di atas garis kemiskinan dapat tetap rentan terhadap guncangan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan adalah capaian penting tetapi tidak identik dengan keamanan ekonomi harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

21. Membaca Data Indonesia 2025-2026: Pertumbuhan, Kemiskinan, dan Gini Ratio

Pertama, pembahasan mengenai BPS mencatat ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen year-on-year dan semester I-2026 5,45 persen tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu BPS mencatat ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen year-on-year dan semester I-2026 5,45 persen perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Gini Ratio Maret 2026 sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu triwulan II-2026

tumbuh 5,29 persen year-on-year dan semester I-2026 5,45 persen menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, *akuntabilitas*, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Gini Ratio Maret 2026 sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025 tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama data menunjukkan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan dapat berjalan bersama fluktuasi ketimpangan, sehingga indikator distribusi harus dibaca multidimensi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, *akuntabilitas*, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa BPS mencatat ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

22. Oligarki dan Demokrasi: Apakah Keduanya Selalu Bertentangan?

Pertama, pembahasan mengenai demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan ketimpangan kekayaan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan

informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, oligarki tidak berarti seluruh kebijakan dikendalikan satu kelompok tunggal tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kompetisi antar-elite kadang membuka ruang bagi masyarakat sipil, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan ketimpangan kekayaan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai oligarki tidak berarti seluruh kebijakan dikendalikan satu kelompok tunggal perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kompetisi antar-elite kadang membuka ruang bagi masyarakat sipil tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama masalah utama muncul ketika kekayaan membeli akses sistematis yang tidak tersedia bagi warga biasa, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu oligarki tidak berarti seluruh kebijakan dikendalikan satu kelompok tunggal menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan ketimpangan kekayaan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

23. Masyarakat Sipil, Akademia, dan Kekuatan Penyeimbang

Pertama, pembahasan mengenai organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, universitas berperan menyediakan evidence dan kritik berbasis penelitian tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama jurnalisme investigatif memperkecil information asymmetry, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai universitas berperan menyediakan evidence dan kritik berbasis penelitian perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, jurnalisme investigatif memperkecil information asymmetry tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama serikat pekerja, asosiasi profesi, komunitas, dan organisasi konsumen memperluas representasi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu universitas

berperan menyediakan evidence dan kritik berbasis penelitian menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

24. Agenda Reformasi: Dari Anti-Oligarki ke Pro-Kompetisi dan Pro-Inklusi

Pertama, pembahasan mengenai agenda reformasi sebaiknya tidak berhenti pada retorika anti-elite perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, tujuan praktis adalah memperluas *contestability* ekonomi dan politik tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama reformasi pendanaan politik, *conflict-of-interest*, *beneficial ownership*, persaingan usaha, pajak, dan pengadaan perlu terintegrasi, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu agenda reformasi sebaiknya tidak berhenti pada retorika anti-elite menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai tujuan praktis adalah memperluas *contestability* ekonomi dan politik perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur

kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, reformasi pendanaan politik, conflict-of-interest, beneficial ownership, persaingan usaha, pajak, dan pengadaan perlu terintegrasi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama kebijakan UMKM dan human capital harus memperbesar mobilitas, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu tujuan praktis adalah memperluas contestability ekonomi dan politik menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Dalam perspektif institusional, pembahasan mengenai reformasi pendanaan politik, conflict-of-interest, beneficial ownership, persaingan usaha, pajak, dan pengadaan perlu terintegrasi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, kebijakan UMKM dan human capital harus memperbesar mobilitas tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama indikator keberhasilan adalah berkurangnya privilege berbasis kedekatan dan meningkatnya opportunity berbasis kemampuan, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu reformasi pendanaan politik, conflict-of-interest, beneficial ownership, persaingan usaha, pajak, dan pengadaan perlu terintegrasi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa agenda reformasi sebaiknya tidak berhenti pada retorika anti-elite harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

25. Skenario Masa Depan menuju Indonesia Emas 2045

Pertama, pembahasan mengenai skenario pertama pertumbuhan inklusif dengan institusi kuat perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, skenario kedua pertumbuhan tinggi tetapi konsentrasi kekayaan menguat tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama skenario ketiga populisme redistributif tanpa produktivitas, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu skenario pertama pertumbuhan inklusif dengan institusi kuat menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai skenario kedua pertumbuhan tinggi tetapi konsentrasi kekayaan menguat perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, skenario ketiga populisme redistributif tanpa produktivitas tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama skenario keempat stagnasi institusional dengan fragmentasi sosial, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu skenario kedua pertumbuhan tinggi tetapi

konsentrasi kekayaan menguat menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa skenario pertama pertumbuhan inklusif dengan institusi kuat harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

26. Implikasi bagi Manajemen, Bisnis, dan Pendidikan Pascasarjana

Pertama, pembahasan mengenai manajer perlu memahami *non-market strategy* dan *political economy* tanpa terjebak *rent seeking* perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, *corporate governance* harus membedakan *lobbying* yang sah dari *capture* tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama ESG dan *stakeholder governance* relevan untuk legitimasi jangka panjang, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu manajer perlu memahami *non-market strategy* dan *political economy* tanpa terjebak *rent seeking* menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai *corporate governance* harus membedakan *lobbying* yang sah dari *capture* perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi

politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, ESG dan stakeholder governance relevan untuk legitimasi jangka panjang tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama mahasiswa manajemen perlu belajar competition policy, public affairs, ethics, dan institutional analysis, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu corporate governance harus membedakan lobbying yang sah dari capture menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari competition by productivity menjadi competition by access. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan rule of law, contestability, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa manajer perlu memahami non-market strategy dan political economy tanpa terjebak rent seeking harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

27. Kesimpulan

Pertama, pembahasan mengenai oligarki adalah persoalan relasi antara kekayaan dan kekuasaan perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, distribusi kekayaan menentukan kualitas kesempatan dan demokrasi ekonomi tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama Indonesia memiliki capaian pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan tetapi tetap menghadapi tantangan konsentrasi aset dan akses, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil privilege, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu oligarki adalah persoalan relasi antara kekayaan dan kekuasaan menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh

kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Kedua, pembahasan mengenai distribusi kekayaan menentukan kualitas kesempatan dan demokrasi ekonomi perlu ditempatkan dalam hubungan antara institusi, insentif, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi politik, hasil yang tampak di permukaan sering kali merupakan produk dari aturan formal, jaringan informal, struktur kepemilikan, dan kemampuan aktor untuk mengubah sumber daya ekonomi menjadi akses terhadap pengambilan keputusan. Karena itu, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan tetapi tetap menghadapi tantangan konsentrasi aset dan akses tidak cukup dipahami sebagai gejala yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama reformasi perlu menjaga investasi sekaligus membatasi *privilege*, sebab ketiganya memengaruhi siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung risiko, serta siapa yang mempunyai kapasitas untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga menghindarkan analisis dari dua penyederhanaan: menganggap semua kekayaan sebagai hasil *privilege*, atau sebaliknya menganggap semua ketimpangan sebagai konsekuensi netral dari pasar. Kekayaan dapat lahir dari inovasi, kerja keras, investasi, warisan, rente, atau kombinasi berbagai faktor; tugas analisis adalah membedakan sumber-sumber tersebut dan menilai konsekuensinya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka pembangunan, isu distribusi kekayaan menentukan kualitas kesempatan dan demokrasi ekonomi menjadi penting karena kualitas pertumbuhan ditentukan bukan hanya oleh besarnya PDB, tetapi juga oleh kemampuan pertumbuhan menciptakan mobilitas sosial, pekerjaan produktif, basis pajak, inovasi, dan kepemilikan aset yang semakin luas. Apabila akses terhadap pasar, kredit, informasi, lisensi, lahan, atau proyek publik sangat dipengaruhi kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka kompetisi dapat berubah dari *competition by productivity* menjadi *competition by access*. Sebaliknya, bila aturan transparan, penegakan hukum konsisten, dan pasar dapat dimasuki oleh pemain baru, perusahaan besar sekalipun dapat memberi kontribusi positif melalui skala, investasi, teknologi, dan ekspor. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan ukuran perusahaan atau kekayaan seseorang semata, melainkan apakah sistem menyediakan *rule of law*, *contestability*, akuntabilitas, dan kesempatan yang masuk akal bagi aktor lain untuk tumbuh.

Ringkasnya, bagian ini menunjukkan bahwa oligarki adalah persoalan relasi antara kekayaan dan kekuasaan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem insentif dan institusi. Reformasi yang efektif tidak cukup mengganti aktor, melainkan harus mengubah aturan yang menentukan bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh politik digunakan, dan bagaimana kesempatan ekonomi dibuka bagi kelompok yang lebih luas.

Glossarium

Oligarki: Struktur kekuasaan di mana aktor yang memiliki konsentrasi sumber daya material yang sangat besar mempunyai kapasitas luar biasa untuk mempertahankan kekayaan dan memengaruhi keputusan publik.

Konsentrasi kekayaan: Pemusatan kepemilikan aset—seperti tanah, properti, saham, perusahaan, dan aset finansial—pada sebagian kecil populasi.

Ketimpangan pendapatan: Perbedaan distribusi arus pendapatan yang diterima individu atau rumah tangga dalam periode tertentu.

Gini Ratio: Indeks ketimpangan distribusi yang bernilai 0 sampai 1; semakin tinggi nilainya, semakin timpang distribusi yang diukur.

State capture: Situasi ketika kepentingan privat yang kuat dapat membentuk aturan, kebijakan, atau institusi negara secara sistematis demi keuntungan mereka.

Rent seeking: Upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui privilege, regulasi, lisensi, atau akses politik, bukan terutama melalui peningkatan produktivitas.

Clientelism: Pertukaran dukungan politik dengan manfaat material atau akses tertentu yang bersifat personalistik dan partikularistik.

Patronase: Distribusi jabatan, proyek, sumber daya, atau manfaat kepada jaringan pendukung sebagai bagian dari hubungan politik.

Beneficial ownership: Identitas orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu perusahaan atau aset.

Market power: Kemampuan perusahaan memengaruhi harga, output, atau kondisi pasar karena lemahnya tekanan kompetisi.

Contestability: Derajat keterbukaan pasar bagi pemain baru untuk masuk, bersaing, dan menantang perusahaan incumbent.

Demokrasi ekonomi: Tatanan ekonomi yang memberi akses luas dan relatif setara terhadap kesempatan, aset, pasar, pembiayaan, dan partisipasi dalam penentuan kebijakan ekonomi.

Political equality: Prinsip bahwa warga memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memengaruhi proses politik, terlepas dari perbedaan kekayaan.

Fiscal redistribution: Penggunaan pajak dan belanja publik untuk mengubah distribusi pendapatan, akses layanan, atau kesempatan ekonomi.

Wealth building: Proses pembentukan aset produktif rumah tangga melalui tabungan, kepemilikan rumah/tanah, investasi, pendidikan, usaha, atau instrumen keuangan.

Industrial policy: Intervensi strategis negara untuk mendorong transformasi struktur produksi, teknologi, nilai tambah, dan daya saing sektor tertentu.

Political economy: Kajian mengenai bagaimana kekuasaan, institusi, kepentingan, dan distribusi sumber daya membentuk keputusan serta hasil ekonomi.

Rule of law: Prinsip bahwa hukum berlaku konsisten, dapat diprediksi, dan mengikat warga maupun pemegang kekuasaan.

UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang memainkan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan ekonomi lokal.

ESG: Kerangka environmental, social, and governance untuk menilai pengelolaan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Indonesia's patronage democracy. In *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia* (pp. 1-19). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997-004>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, February 5). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b, August 5). Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c, August 5). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026d, August 5). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). *Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501719158>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35-57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2014). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics* (pp. 35-56). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501719158-005>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2012). Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case. *New Political Economy*, 17(2), 137-155. <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Sunardi, S. (2020). Oligarki di Indonesia: Relasi kapital yang dominan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 313-317. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a7>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11-33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>
- Winters, J. A. (2014). Oligarchy and democracy in Indonesia. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics* (pp. 11-34). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501719158-004>